73-941598

PNI MASSA MARHAEN

PNI/MARHAENISME

(Sedjarah ringkas & Pokok² Pendjelasan)

Diterbitkan oleh :
Deppenprop D.P.P.- P.N.I.

OKT. 70

XORFB
+
PNI/MARHAENISME

PENTJAKSA MARHAEN

Sedjarah singkat
PARTAI NASIONAL INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sedjarah Singkat Partai Nasional Indonesia ini dimaksudkan untuk sekedar mengisi ke-vacuum-an kepustakaan (literatuur) jang menjangkut sedjarah lengkap PNI jang hingga pada waktu ini belum berhasil dibukukan.

Adalah mendjadi pemikiran didalam Partai untuk menerbitkan sedjarah PNI setjara keseluruhan, baik jang menjangkut ke-Organisasian maupun Program2 perdjoangan beserta pelaksanaannja dari semendjak ia lahir pada tgl. 4 Djuli 1927. Namun hal tsb memerlukan persiapan2 jang lebih tjermat disertai penelitian2 serta pengumpulan bahan2, jang pada achirnja memerlukan suatu djangka waktu jang tjukup lama.

Kebutuhan didalam masjarakat bangsa Indonesia termasuk Keluarga Besar PNI beserta dengan segenap massa Marhaennja terhadap bahan2 batjaan jang memuat keadaan beserta tingkahlaku PNI sebagai suatu badan perdjoangan, mendorong kami untuk menerbitkan risalah jang sangat sederhana ini.

Risalah ini memuat 3 hal, j.i. :

Pertama - tentang sedjarah PNI jang ditekankan kepada Kongres demi Kongres semendjak lahirnja pada tgl. 4 Djuli - 1927 dalam hubungannja dengan progrem maupun garis-politiknja ditengah2 perkembangan situasi politik hingga masa sekarang ini ;

Kedua - tentang pokok2 pendjelasan mengenai Marhaenisme ;

Ketiga - uraian tentang sumber Marhaenisme jang diiringi oleh pendjelasan tentang essensialia Marhaenisme ;

kesemuanja dimaksudkan untuk mendjadi bahan bagi setiap fihak, baik golongan maupun individu untuk dapat mengetahui setjara djelas tentang "A-B-C-"nja PNI dan Marhaenisme.

Tudjuan daripada penerbitan risalah ini a.l. adalah agar semua fihak, baik golongan maupun individu, apakah masjarakat Bangsa Indonesia sendiri ataupun masjarakat di Luar Negeri untuk mengenal dari dekat serta mengetahui apa dan bagaimana PNI dan Marhaenisme, sehingga sedjauh mungkin dapat dihindarkan adanja interpretasi jang salah terhadapnja. Bahwa bilamana selama ini terdapat adanja interpratasi maupun pengertian jang salah didalam kalangan masjarakat terhadap (terutama) ideologi Marhaenisme -- ketjuali dari fihak2 jang memang dilandasi unsur kesengadjaan -- dapat dipandang sebagai akibat dari kurang djelasnja diketahui tentang faham tsb.

Adalah mendjadi hak dari setiap orang diluar PNI dan Organisasi Massa PNI untuk sependapat atau tidak sependapat tentang apa jang dikemukakan didalam risalah ini, namun hal itu tidak mengurangi kebenaran nilai2 ideologis jang terdapat didalamnja, jang njatanja adalah suatu ideologi jang memimpin perdjoangan PNI selama lebih dari 5 windu, jang bagi PNI tentunja untuk seterusnja akan mendjadi asas, ideologi, faham dan tjara perdjoangan.

Karena risalah ini dimaksudkan pula sebagai bahan kelengkapan bagi risalah2 berikutnja, maka adalah mendjadi kewadjiban kami melalui kesempatan ini untuk mengundang sumbangsih terutama dari Keluarga Besar PNI dan Massa Marhaennja berupa bahan-bahan maupun dokumen2 sedjarah PNI, baik Nasional, Regional maupun setempat jang terdapat diseluruh Indonesia.

Semoga penerbitan risalah ini memenuhi sasarannja.

Djakarta, 7 Oktober 1970.-

Departemen Penerangan & Propaganda

D.P.P. - P.N.I.

za.-

BAB-I
tentang
SEDJARAH SINGKAT PNI

4 DJULI 1927 :

Pada tgl.4 Djuli 1927 Ir Soekarno, Ir Anwari, J. Tilaar, Sudjadi, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr Sartono, Mr Budyardjo Martoatmodjo, Dr Samsi Widagdo dan Mr Sunarjo mendirikan "Perserikatan Nasional Indonesia" di Bandung.
Pengurus Besar (Hoofdbestuur) PNI jang pertama ialah : Ketua (Pemuka) - Ir Soekarno ; Sekretaris/ Bendahara - Mr Iskaq dan Anggota2 terdiri dari Dr Samsi, Mr Sartono, Mr Soenario dan Ir Anwari.

Didalam Kongres PNI jang pertama di Surabaja tgl.28-30 Mei 1928, nama "Perserikatan Nasional Indonesia" diganti mendjadi "Partai Nasional Indonesia".
Pada Kongres itu pula disahkan Anggaran Dasar (Statuten), Azas dan Daftar Usaha Partai.

Semendjak berdirinja, maka PNI selalu memelopori usaha persatuan dan kesatuan bangsa dalam perdjoangan menentang pendjadjahan Belanda demi mempertjepat Kemerdekaan Bangsa.

Tgl.4 Djuli 1927 ditetapkan oleh PNI sebagai Hari Lahirnja.

25 APRIL 1931 :

Dikeluarkannja sebuah "Maklumat Kepada Sekalian Rakjat Indonesia", jang antara lain menjatakan membubarkan PNI. Maklumat tsb, jang ditandatangani oleh 19 orang Pimpinan PNI, ditjetuskan dalam suatu Kongres Luar Biasa (Kongres ke-II) PNI di Djakarta.

Sebab jang terpenting dibubarkannja PNI adalah karena penangkapan jang dilakukan oleh Penguasa atas 4 anggota Pimpinan PNI jang kemudian didjatuhi hukuman, j.i. Ir Soekarno, Gatot Mangkupradja, Maskun dan Supriadinata (24 Desember 1929).

Setelah PNI dibubarkan, Pimpinan/Anggota2 PNI bergerak dalam Partindo, Gerindo dan Gapi jang terus berdjuang, termasuk pula masa pendjadjahan Djepang hingga dengan Proklamasi Kemerdekaan R.I.

29-31 DJANUARI 1946 :

Pada tgl.ini PNI melangsungkan Kongres di Kediri, jang kemudian disebut sebagai Kongres Ke-I, sehingga didalam tjatatan urutan Kongres2 jang diadakan oleh Partai ini, kedua Kongres sebelumnja tidak dimasukkan.

Didalam Kongres ke-I ini PNI jang telah bergerak di Pati, Madiun, Palembang dan Sulawesi, "Serikat Rakjat Indonesia" (Serindo), "Partai Republik Indonesia" di Madiun, "Gerakan Republik Indonesia" dll ber-fusi mendjadi PNI.

Kongres Kediri ini menetapkan bahwa azas PNI ialah : "Sosio-Nasional-Demokrasi" jang kemudian dimanifestasikan dalam Lambang PNI j.i. "segitiga dengan kepala banteng" jang menggambarkan sintese dari nasionalisme-demokrasi dan sosialisme.

Pada tgl.25-26 Desember 1946 PNI mengadakan Kongres Luar Biasa untuk menentukan sikap terhadap Naskah Persetudjuan Linggardjati. Sikap tsb ialah : Tidak menerima naskah Persetudjuan Linggardjati karena tidak mengandung pengakuan de jure terhadap R.I.

PNI bersama partai2 lain jang menolak naskah tsb bergabung didalam "Banteng Republik Indonesia" melawan "Sajap Kiri".

3-5 MARET 1947 :

Kongres PNI ke-II di Madiun.
Didalam Kongres ini a.l. ditetapkan garis2 perdjoangan dalam bidang2 : Pemuda, Wanita, Buruh dan Tani. Mula2 pelaksanaan garis2 perdjoangan bidang2 tsb ditampung dan merupakan seksi dalam PNI dan didalam perkembangannja melahirkan Organisasi2 Massa Marhaen.

Pada bulan Oktober 1947 dilangsungkan suatu Konperensi di Solo, dimana untuk pertama kalinja lahir istilah Ketua Umum dan Sekretaris Djenderal dalam kepemimpinan PNI.

25-27 DJUNI 1948 :

Kongres PNI ke-III di Jokjakarta.
Pada Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah : "Sosio-Nasional-Demokrasi" (Marhaenisme), jang merupakan gabungan dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.

Sesudah Kongres ini, dua tragedi Nasional telah melanda Tanah Air :
Pertama, pemberontakan PKI Madiun tgl.18-

September 1948. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI mengadjak PNI dan Masjumi untuk membentuk Front Nasional, akan tetapi ditolak oleh kedua Partai tsb.

Kedua, perang Kolonial ke- II (Agresi ke-II) jang dilantjarkan oleh Tentara Belanda terhadap R.I. pada tgl.19 Desember 1948.
Dewan Partai menginstruksikan kepada seluruh Anggota/Pimpinan PNI, untuk bersikap dan bertindak non-koperasi dengan Belanda.

1-5 MEI 1950 :

Kongres PNI ke-IV di Jokjakarta.

Kongres menetapkan a.l.agar setjepat-tjepatnja dirobah kembali bentuk ketata-negaraan jang berbentuk federasi (RIS) mendjadi Negara Kesatuan, karena Negara Kesatuan paling sesuai dengan paham persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sendiri, dan tidak memberikan kesempatan kepada Belanda untuk mendjalankan politik "dovide et impera"-nja kembali.

1-5 MEI 1951 :

Kongres PNI ke-V di Djakarta.

Kongres menetapkan Pimpinan Partai mendjadi Dewan Pimpinan Partai, sebagai Badan jang tertinggi didalam Partai dibawah Kongres. Dewan Pimpinan Partai mendjalankan pimpinan partai sehari-hari.

Peristiwa penting jang setjara langsung dirasakan oleh PNI sesudah Kongres ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952.
Pimpinan Pemerintahan pada waktu itu ialah Kabinet Wilopo.

Didalam pimpinan partai, Wilopo menduduki djabatan Wakil Ketua Umum, sesuai dengan Keputusan Kongres.

6-11 DESEMBER 1952 :

Kongres PNI ke-VI di Surabaja.

Dalam Kongres ini ditetapkan bahwa azas PNI ialah Marhaenisme, dan tidak menggunakan lagi istilah Sosio-Nasional-Demokrasi.

15-22 DESEMBER 1954 :

Kongres PNI ke-VII di Bandung.

Diantara keputusan2 jang ditjapai dalam Kongres ini, ialah :

1. Menjetudjui maksud Kabinet Ali-Arifin untuk mengadakan Konperensi Asia Afrika ;
2. Meneruskan perdjoangan meng-claim Irian Barat ;
3. Mengandjurkan supaja Kabinet bertindak tegas terhadap anasir2 pengatjau dan gerombolan2 musuh Negara.

- Pada tgl. 18-24 April 1955 ternjata Konperensi Asia-Afrika ke-I diselenggarakan di Bandung.
  Tokoh2 PNI jang setjara langsung berpartisipasi dalam KAA ini ialah Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri, Sunario sebagai Menteri Luar Negeri, A.K.Gani sebagai Menteri Perhubungan, Ruslan Abdulgani sebagai Sekdjen Kementerian Luar Negeri dan Sanusi sebagai Gubernur Djawa Barat.
- 29-30 September 1955 diadakan Pemilihan Umum jang pertama di Indonesia dimana 4 (empat) partai2 keluar sebagai Partai2 Besar, j.i. PNI, Masjumi, NU dan PKI.

22-28 DJULI 1956 :

Kongres PNI ke-VIII di Semarang.
Keputusan2 Kongres a.l. :

1. Mempertjepat pembatalan seluruh perdjandjian KMB ;
2. Melandjutkan perdjoangan pengembalian Irian Barat kepada R.I. ;
3. Kongres diadakan 4 tahun sekali ;
4. Pimpinan Partai dibagai atas Dewan Pimpinan jang mendjalankan kekuasaan executive dan Badan Pekerdja Kongres jang mendjalankan kekuasaan legislatif ;
5. Suapaja diadakan perumusan tentang pengertian demokrasi dengan pimpinan dan Demokrasi Terpimpin, sehingga tidak menimbulkan kesan kearah faham sentralisme/diktatur.

5 DJULI 1959 :

Dekrit Presiden.
Sebelum dikeluarkannja Dekrit Presiden ini, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirim kawat kepada Presiden jang pada waktu itu berada di Tokio (16 Djanuari 1959) agar Presiden mendkritkan berlakunja kembali UUD-1945.

Sementara itu DPP-PNI menginstruksikan kepada Fraksi PNI di Konstituante, supaja

tidak usah lagi menghadiri sidang2 Konstituante.
Sikap PNI ini diambil mengingat Konstituante tidak berhasil memutuskan kembali kepada UUD-1945 sesuai dengan harapan sebagian besar Rakjat dan Pemerintah, dan hal ini mengakibatkan Negara dalam keadaan bahaja.

25-29 DJUNI 1960 :

Kongres PNI ke-IX di Solo.
Keputusan2 Kongres a.l.adalah sbb :

1. Azas PNI ialah Marhaenisme ;
2. Memberikan gelar Bapak Marhaenisme kepada Bung Karno ;

28 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER 1963 :

Kongres PNI ke-X di Purwokerto.
Keputusan2 Kongres a.l. adalah sbb :

1. Gerakan Massa Marhaen mengakui PNI sebagai induk organisasi dan Pimpinan Front Marhaenis, serta pengawasan PNI setjara preventif dan repressif terhadap Gerakan Massa Marhaen ;
2. Untuk membina kebulatan Front Marhaenis, dibentuk Badan Musjawarah Front Marhaenis.

- Pada tgl.13-17 Nopember 1964 diadakan Sidang Badan Pekerdja Kongres PNI di Lembang Bandung.
Sidang BPK ini menerima "Deklarasi Marhaenis" jang didalamnja ditjantumkan rumusan "Marhaenisme" ialah Marxisme" jang ditrapkan sesuai dengan kondisi2 dan situasi Indonesia".
Sesudah Sidang di Lembang itu, timbul perbedaan pendapat dalam kalangan Pimpinan PNI, sehingga pihak Ali-Surachman memetjat beberapa tokoh PNI pada tgl.4 Augustus 1965, a.l. Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hardi, Hadisubeno dan Mh.Isnaeni.
Perlu ditjatat bahwa Hardi dan Mh.Isnaeni adalah masing2 Ketua I dan Wk.Sekdjen PNI pilihan Kongres Purwokerto.
Pada tgl.6 Oktober 1965, lima hari sesudah pemberontakan G.30.S/PKI, tokoh2 tsb. mendirikan DPP PNI baru jang kemudian terkenal dengan nama PNI Osa-Usep.

24-27 APRIL 1966 :

Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM di Bandung, jang djuga disebut Kongres ke-XI.

Kongres ini didahului oleh pertemuan bersama dari pihak Ali-Surachman dan pihak Osa-Usep, pertemuan mana adalah atas prakarsa serta disaksikan oleh Let. Djen.Suharto jang pada waktu itu sebagai pemegang Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).

Kongres ini diselenggarakan oleh Panitya Kongres Persatuan dan Kesatuan PNI/FM jang diketuai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo.
Keputusan2 Kongres a.l. :

1. PNI/FM harus dibersihkan dari unsur2 Gestapu/PKI dan unsur2 jang menimbulkan perpetjahan dalam tubuh PNI/FM ;
2. Kongres merupakan instansi tertinggi Partai, Madjelis Permusjawaratan Partai sebagai Badan Legislatif dan Badan Konsultasi dan Koordinasi antara Partai dengan Gerakan Massa Marhaen.

Tgl.28-30 Nopember 1966 diadakan Sidang MPP-PNI ke-I, dengan keputusan2 a.l. : mentjabut "Deklarasi Marhaenis" dan menetapkan "Yudya Pratidina Marhaenis" sebagai Pedoman Perdjoangan PNI.
Tgl.23-25 Djuli 1967 diadakan Sidang MPP PNI jang ke-II.
Sebelum dan sesudah Sidang MPP ke-II ini, PNI menghadapi tantangan2 jang luar biasa baik setjara intern maupun (terutama) extern. Tekanan2, antjaman2 setjara langsung maupun tidak langsung ditudjukan kepada PNI, bahkan terdapat iktikad jang tidak baik dari pihak tertentu dengan maksud dan usaha untuk membubarkan PNI.
Periode sebelum dan sesudah MPP-PNI jang ke-II merupakan periode konflik jang multi-kompleks.
Namun MPP dapat menghasilkan keputusan2 penting a.l. menjangkut bidang Organisasi, Ekubang dll serta program2 lainnja.

20 DESEMBER 1967 :

"Pernjataan Kebulatan Tekad" Dewan Pimpinan Pusat PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI.
Pernjataan tsb. a.l. memuat :

1. Azas PNI adalah Marhaenisme jang rumusannja ialah : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio Demokrasi ;
2. Melaksanakan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1967 dan tidak menghendaki kembalinja Ir Sukarno dalam kepemimpinan Negara/Pemerintahan/Nasional ;
3. Gelar Bapak Marhaenisme ditiadakan.

21 DESEMBER 1967 :

- "Instruksi Presiden Republik Indonesia

No.16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI".

Instruksi ini ditudjukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah untuk membantu dan memberikan kesempatan atas usaha2 PNI dalam melakukan kristalisasi dan konsolidasi sesuai dengan pokok2 kebidjaksanaan Pemerintah dan Pernjataan Kebulatan Tekad.

- Pada tgl.21 Desember 1967 ini pula dikeluarkannja Surat Presiden (Pd) Republik Indonesia kepada DPP-PNI tentang hak hidup PNI.

Dengan demikian, tiga naskah2 tsb. diatas j.i. 1. Pernjataan Kebulatan Tekad DPP-PNI beserta DPP/Presidium Organisasi Massa PNI, 2. Instruksi Presiden No.16 tahun 1967 tentang Kristalisasi dan Konsolidasi PNI dan 3. Surat Presiden RI kepada DPP-PNI telah memberikan bahak baru bagi perdjoangan PNI untuk mengadakan kristalisasi, konsolidasi dan rehabilitasi didalam tubuhnja.

- Pada tgl.4-6 Mei 1968 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke-III, dengan keputusan2 al.: Menetapkan "Paksha Adigama" sebagai haluan politik Partai, Pokok2 pendjelasan tentang Marhaenisme" sebagai keterangan azas dan tudjuan Partai ; "Marhaenisme berlawanan dengan Marxisme" dan PNI dan Marxisme" sebagai pelengkap keterangan azas dan tudjuan Partai.
  Djuga ditetapkan bahwa istilah "Bapak Marhaenisme" ditiadakan, dan istilah "Fron Marhaenis" dan "Gerakan Massa Marhaen" masing2 diganti dengan "Organisasi Massa PNI. atau "Ormas2 PNI" dan "Organisasi Massa Marhaen".
  Sedjak Sidang MPP-PNI jang ke-III tsb PNI telah berada dalam posisi jang memungkinkan untuk meningkatkan partisipasinja dalam pelaksanaan Ketetapan MPRS dan Pelita I jang take off-nja adalah setahun kemudian (1 April 1969).

-Pada tgl.3-5 April 1969 diadakan Sidang MPP-PNI jang ke IV dengan keputusan2 a.l. : Pembaharuan struktur politik setjara konstitusionil-demokratis ; menerima Dwifungsi ABRI dan diusahakan agar dengan "act of free choice" dapat memasukkan kembali Irian Barat kedalam Wilajah Negara Kesatuan R.I.

-Pada tgl.2-8 Pebruari 1970 PNI mengadakan Musjawarah Besar (Mubes) Ekonomi jang ke-I di Djakarta. Hasilnja ialah, disusunnja suatu Konsepsi dan Program Perdjoangan PNI dibidang Ekubang jang kemudian diterima baik mendjadi keputusan oleh Kongres PNI jang ke-XII di Semarang.

-Pada tgl.9 Maret 1970 ditjetuskannja "Deklarasi 9 Maret" oleh Partai2 PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katholik jang bersedia bekerdjasama dalam satu kelompok, jang kemudian disebut "Kelompok Demokrasi Pembangunan".

11-18 APRIL 1970 :

Kongres PNI ke-XII di Semarang.
Keputusan2 Kongres Semarang a.l.adalah sbb :

1. Azas PNI ialah Marhaenisme, jaitu Ke-Tuhanan Jang Maha Esa - Sosio Nasionalisme - Sosio Demokrasi, jang berarti sama dengan Pantjasila dan menolak Deklarasi Marhaenis ;
2. Menugaskan kepada DPP-PNI untuk membentuk Dewan Pertimbangan Partai (Deperpa) dan merehabilitir seluruh anggota PNI jang dischors/dipetjat sepandjang tidak terlibat G.30.S/PKI ; x)
3. Menerima Dwifungsi ABRI sebagai kenjataan sedjarah jang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan tegaknja Pantjasila dan UUD-1945 dan kesedjahteraan Rakjat;
4. Untuk mentjapai penjederhanaan kepartaian sebagai pelaksanaan Tap MPRS No.XII/MPRS/66, maka RUU Kepartaian/Keormasan/Kekaryaan perlu segera diselesaikan.
5. Menerima "Pernjataan Kebulatan Tekad" DPP-PNI beserta segenap DPP/Presidium Organisasi Massa PNI tgl.20 Desember - 1967 ;
6. Masalah Perang Vietnam diselesaikan oleh Bangsa jang bersangkutan sendiri tanpa intervensi Negara Asing, dan masalah Timur Tengah djangan didjadikan kantjah pertikaian antara negara2 besar didunia.
7. Susunan DPP-PNI, sbb :

Ketua Umum	: Hadisubeno Sosrowerdojo.
Ketua I	: Mh.Isnaeni.
Ketua II	: Prof.Dr.Sunawar Sukowati S.H.
Ketua III	: Drs Hardjantho S
Ketua IV	: Prof.Usep Ranawidjaja SH
Ketua V	: I.B.P. Manuaba.
Ketua VI	: I.A. Moeis.

(Bersambun kehal 8).-

x) setjara langsung maupun tidak langsung

BAB-II
POKOK-POKOK PENDJELASAN tentang M A R H A E N I S M E

I. MARHAEN DAN MARHAENIS

Adalah suatu kenjataan sedjarah, bahwa sebagian terbesar (paling tidak 91%) dari Rakjat Indonesia terdiri dari tani ketjil, buruh ketjil, pegawai ketjil, pedagang ketjil, pengusaha ketjil, jaitu Rakjat miskin, jang hidupnja selalu mengalami kekurangan.
Mereka mempunjai nasib jang sama, jang sehari-harinja selalu terantjam oleh gentjetan ekonomi dan oleh karena itu mereka termasuk golongan jang malang nasibnja.

Golongan inilah jang dalam lingkungan PNI dinamakan kaum Marhaen. Artinja kaum melarat, kaum jang dimelaratkan oleh kondisi pendjadjahan, oleh suatu Bangsa atas Bangsa lain dengan segala bentuk kolonialisme.

Didalam suasana kolonialisme jang ber-abad2 itu, sebagian besar Rakjat Indonesia jg berdjumlah k.l. 91% itu jang terdiri dari kaum jang melarat dan jang dimiskinkan, j.i. kaum Marhaen, tidak mengalami kemadjuan dan tidak pernahme nikmati kebahagiaan. Dan untuk memadjukan Rakjat/Bangsa Indonesia harus ada perdjoangan peningkatan taraf hidup kaum Marhaen dimana ia berada dan dari golongan apapun.
Kemakmuran dan kebahagiaan kaum Marhaen, berarti kemadjuan dan kebahagiaan seluruh Rakjat/Bangsa Indonesia.

Untuk kepentingan ini perlu adanja perdjoangan.
Perdjoangan menudju kearah terwudjutnja masjarakat jang sama rata sama bahagia lahir dan bathin, masjarakat jang didalamnja tidak terdapat penindasan oleh manusia terhadap manusia atau oleh golongan terhadap golongan. Masjarakat itulah jang kita sebut masjarakat Marhaenis, atau masjarakat Pantjasila, masjarakat adil dan makmur jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa. Dan siapapun jang berdjoang untuk kepentingan tertjapainja tudjuan perdjoangan seperti tsb. diatas, maka ia kita sebut seorang Marhaenis. Dengan lain perkataan, seorang Marhaenis adalah jang berdjoang untuk mentjapai masjarakat Sosialis Pantjasila, jang berarti sekaligus merupakan masjarakat jang bahagia bagi kaum Marhaen dimanapun ia berada dari golongan apapun.

II. MARHAENISME.

Marhaenisme adalah pandangan hidup Artinja Marhaenisme adalah satu azas, satu ideologi, satu faham dan tjara perdjoangan kaum Marhaen dan Marhaenis. Dengan landasan azas dan tjara perdjoangan Marhaenisme, kaum Marhaen dan Marhaenis berdjoang untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur, atau masjarakat Marhaenis, atau masjarakat Sosialis Pantjasila.

Marhaenisme sebagai azas, sebagai ideologi dan sebagai faham politik, mengandung tiga unsur, ialah :

a. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa ;
b. Sosio-Nasionalisme ;
c. Sosio Demokrasi.

SOSIO - NASIONALISME

Dalam sedjarah dunia, faham kebangsaan atau Nasionalisme, sering dihinggapi oleh sifat angkara murka, sifat bentji kepada bangsa lain, sifat chauvinistis dan agressif. Sifat2 jang demikian achirnja menumbuhkan sikap ingin mendjadjah bangsa lain. Faham itu adalah faham kebangsaan jang diperalat oleh kapitalisme dan imperialisme.

Sosio-nasionalisme mempunjai watak dan sifat2 jang lain, karena Sosio-nasionalisme adalah faham kebangsaan jang berdasarkan pada persamaan nasib, faham kebangsaan gotong-rojong, faham kebangsaan jang berdasarkan hidup kemasjarakatan, faham kebangsaan jang berperi-kemanusiaan, faham kebangsaan jang berlandaskan pada keinginan kerdjasama dan tidak untuk menggentjet atau menghisap.
Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme jang positip-kreatip, faham kebangsaan jang mentjipta dan memudja.

Sosio berarti kemasjarakatan jang sadar akan kemanusiaan. Dan apabila berbitjara tentang kemasjarakatan dan kemanusiaan, tidak bisa menghindarkan diri dari rasa memudja, jang harus diartikan mengabdi kepada Tuhan Jang Maha Esa. Karena tjelakalah manusia jang tidak silaturachmi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itulah, maka sosio-nasionalisme dengan sendirinja mengandung unsur ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sosio-nasionalisme atau faham kebangsaan, dalam lingkungan bangsa sendiri, bangsa Indonesia, harus bergotong-rojong, dan antara bangsa Indonesia dengan lain2 bangsa djuga harus bekerdja sama dengan pengertian setingkat dan sederedjat. Dalam pengertian ini terkandung sifat ethis, tjinta kasih sesama machluk, sehingga tiada hasrat menguasai dan dikuasai.

Dengan demikian, maka sosio-nasionalisme selalu berwatak anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja.

SOSIO-DEMOKRASI

Sosio-demokrasi adalah demokrasi lengkap, atau demokrasi komplit. Artinja demokrasi jang mentjakup dan meliputi : demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan demokrasi kebudajaan.
Demokrasi politik mengakui hak setiap warga negara, hak rakjat untuk mengatur pemerintahan, menentukan haluan dan susunan negara.
Demokrasi ekonomi mengakui hak setiap warga negara atau setiap orang untuk hidup sama2 makmur, sama2 mengatur penghidupan dan kehidupan.
Demokrasi ekonomi berarti mengakui hak hidup setiap warga negara setjara luas dan baik dalam bidang2 perekonomian.
Demokrasi sosial mengakui hak setiap warga negara, atau setiap orang untuk mendapat penghargaan jang sama sebagai machluk sosial. Demokrasi sosial oleh karenanja mengakui hak setiap orang untuk mentjapai tingkat kemadjuan, tingkat kedudukan sosial setinggi-tingginja dalam segala lapangan dan bidang, sesuai dengan bakat dan kemampuannja.
Demokrasi kebudajaan mengakui hak setiap warga negara dan setiap orang untuk mengembangkan kebudajaan dan menikmati keindahan dan manfaat kebudajaan.
Dalam sosio-demokrasi djelas dikehandaki adanja persamaan hak bagi setiap orang, bagi setiap manusia sebagai sesama ummat Tuhan Jang Maha Esa.
Dengan demikian djelas, bahwa dalam sosio demokrasi djuga tertjakup unsur ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Sosio-Demokrasi menghendaki :

a. Dalam lapangan politik susunan Pemerintahan berdasarkan kedaulatan Rakjat, bentuk Pemerintahan jang sesuai dengan kehendak suara Rakjat dan bentuk negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dalam bidang kemasjarakatan, satu susunan masjarakat jang berdasarkan gotong rojong, atau masjarakat Sosialis Pantjasila.
Oleh karena itu sosio-demokrasi menolak setiap matjam kapitalisme, termasuk Staats-kapitalisme dan berdjoang untuk mewudjutkan kehidupan koperatip.
Sosio-demokrasi memberi kemungkinan berkembangnja usaha swasta, dalam pengertian tidak menimbulkan akibat hak milik atas alat2 produksi menjebabkan adanja penindasan dan penghisapan.

Kesimpulannja : Marhaenisme adalah satu ideologi, atau faham jang termasuk dalam golongan faham Sosialisme, terdiri dari 3 unsur : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-nasionalisme dan Sosio demokrasi.
Dengan perkataan lain : Marhaenisme adalah Sosialisme Pantjasila.

III. MARHAENISME, MARXISME DAN PANTJASILA

Marxisme adalah satu ideologi jang berlandaskan pada karya dan hasil pemikiran Marx. Ada beberapa basic ideas, prinsipalia jang sangat penting dari Marxisme sebagai pentjerminan kemurnian faham atau ideologi tsb. Diantara sekian banjak prinsipalia dan essonsialia jang menondjol ialah :

a. Marxisme tidak mengenal nasionalisme atau faham kebangsaan, oleh karena sifatnja jang internasionalistis-kosmopolitan.

b. Marxisme menganut teori, bahwa kehidupan manusia dan tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada kehidupan kebendaan, jang terkenal dengan teori historis-materialisme.

c. Marxisme tidak mau tau mengenai kekuatan absolut, jaitu Tuhan Jang Maha Esa, sehingga akibatnja ia anti Tuhan dan anti Agama.
d. Marxisme dalam perdjoangannja menudju kearah terwud djutnja susunan masjarakat komunistis, dan menggunakan sistim diktatur proletariat.
e. Marxisme dengan proletar dan teori meerwaarde-nja dalam perdjoangan mewudjutkan tjita2nja menganut teori perdjoangan kelas, atau klassenstrijd.

Tidak ada satupun diantara basic edeas atau prinsip dari Marxisme seperti tersebut diatas jang dianut oleh Marhaenisme. Disamping ditolak, malahan bertentangan dengan Marhaenisme.

Marhaenisme djelas menganut faham kebangsaan, ialah kebangsaan-kemasjarakatan, atau sosio-nasionalisme. Marhaenisme menghidup-hidupkan, memelihara dan mempertebal semangat kebangsaan.

Sosio-nasionalisme mengakui bahwa bangsa2 adalah segolongan manusia jang tidak terpisah dengan golongan lain, malahan harus hidup bersama dengan golongan2 itu. Oleh karena itu, dalam hubungan internasional, sosio-nasionalisme mengakui kewadjiban bangsa2 untuk bekerdja sama menjusun masjarakat bangsa2 didunia, bebas dari dominasi, pendjadjahan, penindasan, baik politis, ekonomis maupun kulturil. Dengan perkataan lain, kosmopolitanisme atau internasionalisme jang menghapuskan nasionalisme adalah bertentangan dengan Marhaenisme. Marhaenisme tidak dapat sepenuhnja membenakan dalil atau teori bahwa perkembangan kehidupan manusia dan tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada kebendaan. Tidak dapat meerima teori bahwa tjorak masjarakat sepenuhnja dipengaruhi dan tergantung pada keadaan ekonomi.
Marhaenisme berpendapat, bahwa bukan hanja kondisi ekonomi, akan tetapi djuga kondisi bathin menentukan tjorak dan perkembangan masjarakat. Baik kekuatan rochani, ataupun tjita2 maupun kekuatan djasmaniah atau ekonomi, kedua-duanja sama2 berpengaruh pada gerak, tjorak dan perkembangan masjarakat.

Marhaenisme mengakui sepenuhnja adanja kekuatan absoluut (absolute Macht) jang ada pada Tuhan Jang Maha Esa. Baik sosio-nasionalisme maupun sosio-demokrasi, kedua-duanja diresapi sinar hikmah ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dengan demikian djelas, Marhaenisme adalah ber-Tuhan.

Marhaenisme menganut faham demokrasi, jang dalam hal ini adalah sosio-demokrasi. Demokrasi lengkap atau demokrasi komplit, jang mentjakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan demokrasi kebudajaan.

Faham sosio-demokrasi menghendaki susunan pergaulan hidup sama rata dan sama bahagia, sehingga dengan demikian menolak setiap matjam/bentuk diktatur, termasuk diktatur proletariat. Kaum Marhaen bukan hanja kaum proletar seperti jang dikatakan oleh kaum Marxis ialah kaum pendjual tenaga, bukan hanja kaum buruh jang mendjual tenaganja kepada kaum madjikan

Kaum Marhaen adalah keseluruhan Rakjat Indonesia dimanapun berada dan dari golongan manpun jang dimelaratkan oleh kolonialisme dan kapitalisme. Dengan demikian maka didalam Marhaenisme tidak dikenal satu matjam kelas, dalam hal ini kelas proletar jang tertindas, jang selalu berlawanan dan berhadapan dengan kaum penindas, sehingga dengan demikian Marhaenisme tidak menganut sistim perdjoangan kelas seperti jang diadjarkan oleh Marxisme.

Perdjoangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tjita2nja tidak hanja dilakukan oleh satu golongan sadja, akan tetapi oleh segenap potensi kaum Marhaen dan Marhaenis, jang terdiri dari berbagai matjam golongan. Perdjoangan menghantjurkan kolonialisme, dilaksanakan oleh segenap kekuatan Rakjat. Oleh karena itulah teori perdjoangan kelas, atau klas-

senstrijd jang hanja mengenal perdjoangan kelas proletar sebagai kelas jang tertindas, untuk menghantjurkan kelas penindas tidak berlaku bagi Marhaenisme.

Dalam masa pendjadjahan seluruh kekuatan Rakjat berdjoang menghantjurkan kolonialisme. Dan setelah mentjapai kemerdekaan, maka di alam meredeka ini, dengan tjara dan tjorak lain dari pada didjaman kolonial meland djutkan perdjoangan membina dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan tjita2 jang terkandung didalam Pantjasila.

Dari kenjataan2 dan perbandingan seperti diatas, maka djelas antara Marhaenisme dan Marxisme terdapat perbedaan2 jang prinsipil dan esseniil.
Basic ideas, prinsipalia dan essensialia adjaran Marxisme bukan sadja tidak berlaku bagi Marhaenisme, akan tetapi bahkan berlawanan.

Dengan demikian maka djelas, definisi, interpretasi atau pengertian bahwa Marhaenisme adalah "Marxisme jg ditrapkan di Indonesia", adalah satu kekeliruan jang besar.

Itulah sebabnja Sidang MPP-PNI jang ke-I pada bulan Nopember 1966 setjara resmi menolak "Deklarasi Marhaenis" dan diganti dengan "Yudya Pratidina Marhaenis", jang isinja tegas menjatakan, bahwa Marhaenisme adalah : Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrassi, jang pada hakekatnja sama dengan Pantjasila.

Memang ditindjau dari segi sedjarah, Marhaenisme lebih tua daripada Pantjasila. Sedjak lahirnja, Marhaenisme mengandung unsur2 Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Setjara historis factuil dalam pidato Lahirnja Pantjasila pada tanggal 1 Djuni 1945 tertjakup pula - Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Demgan demikian tidak salah kira nja, apabila kita katakan bahwa Marhaenisme adalah identik dengan Pantjasila.

IV. MASJARAKAT MARHAENIS

Dari ketegasan2 seperti diatas maka djelaslah, bahwa masjarakat Marhaenis adalah masjarakat Sosialis Pantjasila, masjarakat adil dan makmur, jang tidak membenarkan adanja tindas menindas antar manusia atau antar golongan.

Dengan perkataan lain, pada hakekatnja masjarakat Marhaenis atau masjarakat Sosialis Pantjasila adalah suatu perwudjudan setjara konsekwen dari Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Mukadimah sampai dengan Batang Tubuhnja.-

---

7. Susunan DPP-PNI, sbb :

(Sambungan dari hal 4).-

Sekdjen I : Abdul Madjid.

Sekdjen II : Drs. H.A. Karundeng.

Sekdjen III : Aberson M.S.

Bendahara I : Budi Dipojuwono.

Bendahara II : Notosukardjo.

Bendahara III : Drs. M.A.Gowi.

Anggota2 :

1. Rasjid St.Radjamas.
2. Subekti.
3. H.N.P.S. Siregar
4. H. Mas Ripaie

BAB-III
tentang
MARHAENISME : SUMBER DAN ESSENSIALIA-NJA.

Sumber Marhaenisme

Sumber Marhaenisme adalah Gelora Djiwa Perdjoangan Bangsa Indonesia, jaitu gelora perdjoangan jang timbul karena menderita pahit-getirnja segala kesengsaraan sebagai akibat dari pendjadjahan Bangsa Asing mentjengkeram Bangsa Indonesia selama 3½ abad.

Suatu perdjoangan sengat melawan penindasan dan penghisapan Inperialisme dan Kolonialisme, jang memperkosa kehidupan Bangsa2 jang tidak berdaja. Semangat perdjuangan Bangsa Indonesia itu bukan sadja ingin membebaskan Indonesia dari belenggu Kolonialisme, akan tetapi djuga merupakan suatu tantangan terhadap segala unsur buruk jg merusak ketertiban tata-kehidupan Masjarakat Dunia.
Menggeloranja djiwa perdjuangan Bangsa Indonesia itulah jang pada taraf permulaan mendjadi sumber kelahiran segala inspirasi, segala idee, budi, spirit dan dinamik perdjuangan asli-patriotik Bangsa Indonesia.

Unsur2 kekuatan perdjuangan itu kemudian diolah, diperlengkapi dan dirumuskan, sehingga lahirlah suatu azas. Tumbuhlah teori2 perdjuangan Marhaenis jang methodis-rasionil-ilmiah dan selandjutnja tersusunlah program2 perdjuangan Marhaenis jang realistis dan pragmatis.

Sumber Marhaenisme bukanlah buah pikiran hasil tjipta Sardjana2 Asing, melainkan Gelora Djiwa Perdjuangan Bangsa Indonesia.

Essensialia Marhaenisme:

Marhaenisme mengandung idee dan spirit kearah memsatu-padukan serta menggembleng semua tjita2 dan semua dinamik perdjuangan patriotik Bangsa Indonesia, hidup dari Abad ke Abad dan jang tumbuh tersebar diseluruh Nusantara.

Idee dan spirit itu djelas dan terang bersinar dari segala jang tersurat dan tersirat dalam dokumen2 bersedjarah. Faham, pandangan2, pengertian2 dan konsepsi2 pokok setjara konkrit telah tjukup banjak digariskan dan dihidangkan. Bagi kita dokumen2 sedjarah itu sudah tjukup banjak mengandung idee2, budi dan pikiran2 sebagai kekajaan spirituil dan idiil jang dapat kita djadikan bahan2 renungan kearah mentjapai falsafah, teori serta program perdjuangan Marhaenisme.

Intisari falsafah jang terkandung dalam Marhaenisme dapat dirumuskan :
Marhaenisme mengakui adanja dua kekuatan hidup, ialah kekuatan idee dan kekuatan materi jang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnja karena adanja pengaruh timbal-balik antara kedua kekuatan tsb.

Marhaenisme mengandung suatu kejakinan, bahwa dinamik jang tumbuh dari keseluruhan segala kekuatan lahir dan batin, dari keseluruhan segala kekuatan materil dan spirituil, dinamik itulah jang menentukan gerak-tumbuhnja Masjarakat, roboh-mengembangnja sedjarah dan bangun-djatuhnja peradaban manusia. Gerak-gerik hidup sesuatu manusia atau bangsa tidak hanja didorong oleh keinginan untuk mengisi perutnja dengan makanan, untuk melindungi dirinja dengan pakaian dan perumahan, atau hanja didorong oleh keinginan untuk mengisi otak dan djiwanja dengan pikiran dan kejakinan sadja, akan tetapi didorong oleh keseluruhan segala keinginan untuk mentjapai hidup senang dan tenteram didunia ini, jaitu hidup bahagia lahir dan bathin.
Karena itu Marhaenisme adalah tuntu-

n

r

nan kearah mentjapai keseimbangan jang harmonis antara h hidup lahir dan hidup bathin, menudju kesempurnaan hidup seorang dan hidup kemasjarakatan ialah masjarakat jang adil dan makmur dan tata-tentram.

Itulah intisari falsafah Marhaenisme. Intisari falsafah jang chas ini adalah hasil pengertian jang setepat-tepatnja tentang kekuatan2 dan daja hidup manusia, hasil penggalian jang dalam dari sumber kehidupan manusia, ialah budi-nurani-kemanusiaan, hasil pemandangan wilajah kehidupan manusia jang seluas-luasnja, ialah masjarakat manusia dan hasil peneropongan djangka kehidupan manusia jang sedjauh-djauhnja jaitu sedjarah manusia.

Bertalian dengan intisari falsafah ini sebagai sumber dan landasan idiil, maka tumbuhlah ideologi baru dengan falsafah faham2, teori2 baru, tumbuh dibidang peri-kehidupan dan perdjuangan hidup manusia, dibidang kenegaraan, kemasjarakatan, ekonomi dan kebudajaan jang semuanja bersifat dan bertjorak chas, bersifat dan bertjorak spesifik Indonesia. Tumbuhlah Marhaenisme sebagai magmanja Pantjasila, faham socio-nasionalisme socio-demokrasi.

Demikianlah Marhaenisme sebagai magmanja dan kemudian Pantjasila tumbuh mendjadi pandangan hidup Bangsa Indonesia. Marhaenisme adalah suatu ideologi terseddiri dengan pengertian dan faham tersendiri pula terhadap hidup manusia, perkembangan dunia, alam moral, keagamaan, keadilan, hukum, logika, ethika, aesthetika dlsb.

Marhaenisme mengakui Ketuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial sebagai fundamen2 sprituil dan materiil jang seharusnja didjadikan dasar2 hidup kemasjarakatan dan kenegaraan bagi ummat manusia, chususnja bagi Bangsa Indonesia.

Tjita2 Marhaenisme dibidang kenegaraan, kemasjarakatan, ekonomi, kebudajaan adalah lain daripada jg ditjita-tjitakan dan dikonsepsikan oleh faham Liberalisme, faham Marxisme, Komunisme, Nazi-isme, Fascisme. Marhaenisme setjara fundamentil orinsipiil berbeda sekali dari Liberalisme, Marxisme, Komunisme, dan lain2nja, berbeda dalam djiwa, dasar serta tudjuan, berlainan mulai dari landasan idiil, strategi perdjuangan sampai kepada tudjuannja terachir, ialah sampai pada bentuk dan struktur masjarakat dunia jang diidam2kannja.

Sosialisme jang terkandung dalam Marhaenisme adalah berbeda dengan Sosialisme Utopis, Marxis, Revisionis dan Komunis.
Faham Liberalisme politik dengan Demokrasi Liberalisme, Liberalisme Ekonomi dengan Kapitalismenja, faham Absolutisme, faham materialisme, faham Marxisme dengan dialektis-Matrialismenja, Historis-Matrialismenja, Ekonomis-determinismenja, dengan teori2 pertentangan kelas, Akumulasi, Krisis dan teori verdelingnja, faham Komunis-Bolsjewik dengan Demokrasi Sentralismenja, kultus-individu dan teori revolusi-dunia model Stalinnja, faham Nazi-isme dengan teoriras-nja, itu kesemuanja adalah faham kuno jang sempit, sudah lapuk dan pada dasarnja destruktif. Itu semua a adalah faham2 jang melihat serta mengukur kehidupan manusia dan perkembangan dunia hanja dari satu dua segi kehidupan sadja, dari segi satu atau dua kepentingan hidup sadja. Faham2 itu hanja dapat melihat satu atau dua pohon kehidupan sadja, akan tetapi buta untuk dapat melihat seluruh hutan.

Marhaenisme adalah lain sekali dari isme kuno termaksud. Dalam Marhaenisme, semua getaran hidup dan irama zaman jang berkembang dari masa kemasa diolah dan disalurkan kearah perikehidupan manusia jang sewadjarnja. Untuk menundjukkan pada masjarakat dan djuga kepada golongan2 tertentu jang gegabah menuduh Marhaenisme adalah identik dengan Komunis-

me, maka dapat digambarkan didalam garis besarnja adjaran Marhaenisme dalam mendidik warganja sebagai berikut :

1. Seorang Marhaenis sebagai manusia Budaja :
   a. Ia berfikir benar karena ia ber-ilmu. Dengan djalan meng-ilmu ia mentjapai logos, tahu apa jang benar apa jg salah, dan ia /me- milih djalan jang benar dalam hidupnja.
   b. Ia berbudi baik karena ia bermoral. Dengan latihan achlak ia mentjapai Ethos, tahu apa jg baik apa jang buruk, dan ia memilih djalan jang baik dalam hidupnja.
   c. Ia bertjita-tjita indah karena ia ber-rasa seni. Dengan rasa seninja ia tahu apa jang indah apa jang djelek, dan ia mentjintakan keindahan dalam hidupnja.
   d. Ia persembahkan segala hasil karyanja, filsafat ilmu budi, dan seni kepada masjarakat. Sebagai budajawan ia adalah pahlawan kebudajaan Nasional, jang mendjaga dan memelihara kepribadian Bangsa.
2. Seorang Marhaenis sebagai Filusuf :
   a. Ia hidup berdasarkan na
3. Seorang Marhaenis sebagai Moralis
   a. Ia mentjari kebaikan budi achlak dengan menjilami alam budi nurani manusia sedalam-dalamnja dan menggali segala tata-susila dan sopan santun jang mendjadi norma dan hukum hidup
   b. Ia mendapatkan kebaikan budi achlak dengan mengakui kaidah2 ke-Tuhanan dan kaidah2 kemanusiaan sebagai dasar naluri hidup.
   c. Ia merindukan keluhuran budi dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis antara kaidah2 ke-Tuhanan dan kaidah2 kemanusiaan.
4. Seorang Marhaenis sebagai Aestetikus :
   a. Ia mentjari keindahan tjita dengan meresapkan dan mengambil keindahan2 bentuk, sifat dan daja hidup jang ada dalam alam disekitarnja.
   b. Ia mendapatkan keindahan dengan memiliki rasa seni dan daja tjipta.
   c. Ia mentjiptakan dan mentjita-tjitakan kehidupan lahir batin manusia jang indah dengan ichtiar mentjapai perpaduan jang harmonis ~~antara keindahan pri~~ badi manusia dan keindahan a-
   d. Ia merindukan kesempurnaan hidup jang bersifat kebahagiaan hidup lahir-bathin dengan ichtiar mentjapai imbangan jang harmonis antara kekuatan hidup lahir dan kekuatan hidup bathin.

materi jang karena pengaruh timbal-baliknja tidak dapat dipisahkan satu sama lainnja.

c. Ia adalah seorang nasionalis, akan tetapi ia bukan seorang chauvinis. Ia tidak melupan kebahagiaan hidup antar-bangsa.

d. Ia adalah seorang demokrat, dalam arti penganut-penganut faham demokrasi Pantja sila, bukan penganut demokrasi hukum rimba, bukan penganut demokrasi liberalis, ia merindukan demokrasi - lengkap disegala bidang kehidupan, jaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

e. Ia adalah seorang sosialis, dalam arti bukan penganut totaliterisme jang memperbudak pribadi2 manusia. Ia merindukan keadilan sosial dan karena itu menentang penindasan, penghisapan dan perbudakan sesama manusia.

f. Ia adalah seorang pemimpin rakjat, jang arif-bidjaksana dan mengenal batas2 sikap lunak dan sikap keras.

g. Ia adalah seorang pedjuang, jang ulet dan revolusioner dinamis dan konsekwen dalam sepak terdjang dan pendirian terhadap tjita2 perdjuangannja.

h. Ia adalah seorang negarawan, jang tjakap dan djudjur. Ia punja rasa tanggung djawab dan sadar akan segala amanat rakjat jang mendjadi tugas kewadjibannja.

i. Ia adalah seorang progagandis, jang dapat memikat hati rakjat, dapat membangkitkan kesadaran, keinsjafan, dan dinamik untuk berdjuang didjalan jang benar.

6. Seorang Marhaenis sebagai anggota masjarakat :

a. Dalam hidup perekonomian ia adalah seorang karyawan jg mendapatkan nafkah penghidupannja dengan kerdja kooperatif. Ia bukan seorang individualis-materialis-egois jang haus-rakus akan harta benda bagi kepentingan hidupnja sendiri. Ia adalah seorang karyawan jang bekerdja untuk kemakmuran hidup seluruh anggota masjarakat.

b. Dalam hidup keberahian ia adalah seorang susilawan jang tahu mengendalikan dan membatasi hawa-nafsunja.

c. Dalam hidup pergaulan ia adalah seorang budiman jang bermoral, sopan santun dan ramah tamah terhadap sesama manusia, tak membeda-bedakan karena pangkat, harkat, golongan, atau kepertjajaan.

d. Dalam hidup keilmuan ia adalah seorang tjendekiawan jang menggunakan ilmunja untuk kemasjarakatan dan kemadjuan masjarakat.

e. Dalam hidup keguruan ia adalah seorang guru pendidik luhur budi, jang djauh mengawang kedepan akan pertumbuhan bangsanja, penjantun djiwa, pemupuk tunas2 manusia Indonesia baru.

f. Dalam hidup keagamaan ia adalah seorang Agamawan jang tulus dan bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.

g. Dalam hidup kesenian ia adalah seorang seniman jang mentjipta menurut tuntunan naluri kepribadian Marhaenis.

7. Seorang Marhaenis sebagai ummat manusia :

a. Ia adalah seorang humanis-idealis jang merindukan suatu persahabatan, persaudaraan dan perdamaian ummat manusia atas dasar azas2 Ketuhanan dan azas2 Kemanusiaan.

b. Ia adalah seorang humanis-sosialis jang memperdjuangkan keadilan sosial antar manusia, antar bangsa dan antar Negara jg riil, ichlas dan djudjur atas dasar saling bantu membantu, saling hormat-menghormati, dan atas dasar sama deradjat, sama hak dan sama kewadjiban.

c. Ia adalah seorang humanis-realis jang sadar dan insjaf akan adanja kekurangan dan kelemahan tapi djuga akan adanja daja2 kekuatan setiap pribadi manusia. Ia ingin dan siap menjapu bersih setiap ketidak-adilan, keburukan dan kedjahatan dan

ia ingin menegakkan keadilan dan kebenaran jg abadi, diatas dunia ini.

P E N U T U P.

Sedjarah Revolusi Indonesia telah membuktikan, bahwa faham2 seperti Komunisme, liberalisme dan Marxisme jang toegespast di-Indonesia itu adalah sangat berbahaja bagi Revolusi Nasional Indonesia dan merupakan ratjun bagi Negara dan Bangsa Indonesia.

Imperialisme Marxis, Imperialisme Liberalis dan Imperialisme Komunis itulah jang telah merusak djiwa, dasar dan tudjuan Revolusi Nasional Indonesia.
Dan imperialisme ideologi dan politik jang dilantjarkan oleh Negara2 Asing itu lah pula jang telah merusak keutuhan dan persatuan nasional Bangsa Indonesia serta mentrasformirnja mendjadi pertentangan dunia jang toe gespast di-Indonesia.

Itu adalah fakta dalam sedjarah Revolusi Bangsa Indonesia, fakta jang pahit, fakta dan pengalaman jang perlu didjadikan tjermin dalam membina perkembangan kehidupan politik pada waktu sekarang dan masa datang.

Selama aliran2 Marxis Sosialis-Kanan, Komunis dan Liberalis masih berkuasa atau sekurang-kurangnja berusaha untuk berkuasa, maka pada masa itu pulalah timbul huru-hara, jang pada dasarnja disebabkan pertentangan pertentangan dan permusuhan diantara mereka-mereka sendiri.

Kiranja tidak berlebih-lebihan untuk karenanja mengemukakan, bahwa faham jg lahir dari Gelora Perdjoangan Bangsa Indonesia -- jaitu Marhaenisme -- sebagai faham jang chas berkeperibadian Indonesia, maka faham itulah jang sesuai bagi kaum Marhaen dan Marhaenis jang djumlahnja paling tidak 91 % dari seluruh Rakjat Indonesia.

Dengan ideologi Marhaenisme PNI berdjoang terus sehingga-Marhaen Djaja !

O R M A S2 P.N.I. :

1. KESATUAN BURUH MARHAENIS (K.B.M.)
2. PERSATUAN TANI NASIONAL INDONESIA (PETANI)
3. GERAKAN WANITA MARHAENIS (WANITA MARHAENIS)
4. GERAKAN PEMUDA MARHAENIS (PEMUDA MARHAENIS)
5. GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (G.M.N.I.)
6. GERAKAN SISWA NASIONAL INDONESIA (G.S.N.I.)
7. KEMBAGA KEBUDAJAAN NASIONAL (L.K.N.)
8. DJAMIATUL MUSLIMIN INDONESIA (D. M. I.)
9. GERAKAN PENDIDIK MARHAENIS (PENDIDIK MARHAENIS)
10. IKATAN SARDJANA RAKJAT INDONESIA (I.S.R.I.)
11. GERAKAN PAMONG RAKJAT MARHAENIS (G. P. R. M.)
12. GERAKAN NELAJAN MARHAENIS (NELAJAN MARHAENIS)
13. IKATAN KRISTEN INDONESIA (IKA-KRESNA)
14. ORGANISASI2 MASSA MARHAEN LAINNJA JANG DENGAN PERSETUDJUAN D.P.P. PARTAI MEMUTUSKAN BERNAUNG DIBAWAH P.N.I.